

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia saat ini menggunakan pendekatan kepariwisataan inklusif. Dimana, perkembangan pariwisata Indonesia juga menjadi fokus pemerintah dalam menaikkan devisa negara. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki salah satu cara dalam meningkatkan daya tarik wisata dalam negeri dengan membuat berbagai upaya. Dalam upaya untuk terus mengembangkan pariwisata, pemerintah mengacu pada kebutuhan wisatawan yang merupakan hak setiap masyarakat dalam menikmati fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah termasuk bagi penyandang disabilitas. Pengembangan pariwisata juga mampu meningkatkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara, dengan memanfaatkan potensi pariwisata secara optimal, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ismail, dkk (2023:12) inklusifitas merupakan ajakan atau mengikutsertakan. Hal ini mengimplikasikan bahwa sikap ini sangat diperlukan dalam sebuah lingkungan. Inklusif pada dasarnya adalah memosisikan diri dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain yang ada di sekitarnya. Inklusivitas menjadikan masyarakat memiliki wawasan yang terbuka terkait keberagaman identitas serta menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi. Selain itu, dengan adanya sifat inklusif masyarakat, dapat menerima dan mudah berinteraksi dengan latar belakang dan identitas lainnya. Tujuan pembangunan inklusif adalah menjamin manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa

diskriminasi dalam bentuk apapun.

Pengembangan sektor pariwisata pada saat ini menjadi pokok pembangunan, dimana pembangunan wisata ini menjadi konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pengembangan wisata dengan memerhatikan minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat lokal dengan menjaga kestabilan lingkungan dalam pengelolaan wisata yang berorientasi pada jangka panjang.

Pariwisata merupakan sektor yang cukup besar di dunia dan memberikan berbagai dampak positif dan negatif. Konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan muncul untuk mengatasi dampak negatif pembangunan pariwisata dengan prinsip membangun pariwisata dan memenuhi kebutuhan seluruh stakeholder pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.

Salah satu daerah di Provinsi Aceh yang saat ini terkenal dengan destinasi ekowisatanya adalah Kabupaten Bireuen. Kabupaten Bireuen merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis Kabupaten Bireuen yang mempunyai letak strategis juga merupakan salah satu faktor meningkatnya kunjungan wisatawan di Bireuen. Hal itu disebabkan karena tidak sedikit wisatawan pengguna jalur darat yang meluangkan waktu untuk singgah di Kabupaten Bireuen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kepariwisataan, menjelaskan bahwa Undang-Undang tersebut dibuat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kepariwisataan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Pariwisata, dalam mengembangkan pariwisata harus dilihat berdasarkan meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi, ekonomi kreatif nasional I, meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan, meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan indonesia, bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terwujudnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif, meningkatnya kapabilitas sdm kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, membahas mengenai pelestarian wisata, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bireuen juga tidak terlepas dari Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Bireuen. Pengelolaan pariwisata Bireuen sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh memiliki objek pariwisata yang menarik untuk di kunjungi setiap tahunnya.

Berdasarkan observasi awal melalui pengamatan langsung, peneliti menemukan bahwa sebelum pantai cemara di resmikan, pengunjung hanya sedikit yang melakukan kunjungan dan hanya berkunjung dihari libur saja untuk menikmati suasana pantai. Namun, sekarang ini kunjungan wisatawan mulai ramai, sehingga pedagang di lokasi wisata mulai meraup keuntungan dari hasil berjualannya dan hal ini memberikan dampak baik dalam peningkatan pendapatan

masyarakat lokal (Observasi awal, 10 Oktober 2024).

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan Informan sebagai tokoh masyarakat, mengatakan bahwa objek wisata tersebut bertujuan untuk menjadi tempat liburan keluarga dan bermain anak-anak serta peningkatan pengunjung di Pantai Cemara dikarenakan tempat, sarana dan prasarana yang sudah memadai. Sehingga pengunjung merasa nyaman dan aman berada di objek wisata tersebut (Wawancara awal, 10 Oktober 2024).

Sebelum adanya pengembangan pariwisata, masyarakat yang berada tidak jauh dari lokasi wisata hanya memperoleh pendapatan dari hasil bekerja sebagai buruh atau lainnya. Pendapatan mereka berada di bawah Rp.50.000 setiap harinya. Pengembangan objek wisata Pantai Cemara dilakukan oleh stakeholder terutama dinas pariwisata dan pemerintah gampong. Pengembangan wisata Pantai Cemara memberikan dampak bagus dalam peningkatan pendapatan masyarakat meskipun belum maksimal dikarenakan peningkatan pendapatan tersebut hanya dirasakan oleh pedagang dan tukang parkir, sementara masyarakat lokal lainnya belum merasakan hal tersebut secara merata. Peningkatan pendapatan Gampong di lokasi wisata terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1  
PAD Gampong Lingakuta Tahun 2019-2024

Tahun	Perekonomian Desa Wilayah Pantai Cemara
2019	Rp.8.324.233
2020	Rp.765.000
2021	Rp.9.230.00
2022	Rp.6.870.000
2023	Rp.11.632.000
2024	Rp.14.210.000

*Sumber: Laporan Gampong Lingakuta, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sepanjang tahun 2019 ke tahun 2024 perekonomian masyarakat di Gampong Lingakuta mengalami fluktuasi

dimana terjadi peningkatan dan penurunan, pada tahun 2019 perekonomian mencapai Rp.8.324.233 namun pada tahun 2020 perekonomian Gampong Lingakuta mengalami penurunan sebesar Rp.765.000, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp.9.230.000, akan tetapi di tahun 2022 perekonomian Gampong Lingakuta mengalami penurunan sebesar 6.870.000, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023-2024. Hal ini menjadi salah satu penyebab sektor pariwisata belum memberikan dampak secara maksimal dalam pendapatan Gampong.

Pantai Cemara yang terletak di Kecamatan Gandapura mulai dikenal sejak tahun 2019 sampai saat ini wisata Pantai Cemara masih sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, bukan dari daerah Kabupaten Bireuen saja melainkan juga dari daerah lainnya. Peningkatan jumlah pengunjung di Pantai Cemara membuktikan bahwa Pantai Cemara merupakan pantai yang memiliki inklusivitas dalam hal pembangunan serta pengelolaannya.

Pada tahun 2021 objek wisata Pantai Cemara ini mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.500.000.000 dari kementerian desa. Bantuan program objek pengembangan wisata tersebut berupa pembangunan 9 kios pedagang, masing-masing berukuran 3x3,5 meter dan juga satu balai tradisional berukuran 6x11 meter, kamar mandi, mushalla, jalan internal, dan tempat parkir dan jaringan air. Pantai Cemara tersebut sudah diresmikan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pada tanggal 5 Agustus 2023.

Berdasarkan pengamatan, ditemukan bahwa pengembangan Pantai Cemara di Kabupaten Bireuen belum meningkatkan pendapatan masyarakat

secara signifikan, karena belum terjadinya pemerataan pendapatan, dampak dari pariwisata hanya dirasakan oleh pedagang yang mendapatkan lapak berjualan dan juga juru parkir. Kemudian terjadinya pencemaran lingkungan karena minimnya tempat sampah yang mengakibatkan sebahagian pengunjung membuang sampah di celah-celah batu.

Fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, dan juga retribusi parkir belum mampu meningkatkan pendapatan asli gampong, infrastruktur yang belum memadai seperti tidak adanya penunjuk arah menuju pantai cemara dan jalan masuk padat pada hari-hari tertentu (hari peukan), sehingga menimbulkan kemacetan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menemukan permasalahan pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara Kabupaten Bireuen, sehingga untuk meminimalisir banyak nya permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai pengembangan pariwisata tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara Kabupaten Bireuen?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Dari permasalahan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara Kabupaten Bireuen.
2. Hambatan dalam pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara Kabupaten Bireuen.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan pariwisata inklusif di Pantai Cemara Kabupaten Bireuen.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

#### **1.5.1 Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah

Untuk membantu dalam meningkatkan wisata menjadi lebih berkembang.

2. Bagi Universitas

Dapat menambah buku referensi mengenai pariwisata inklusif dan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memerlukan informasi mengenai inklusifitas dalam pengelolaan objek wisata.

### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penalaran dalam mengamati dunia praktek nyata dengan teori yang didapat serta dapat menerapkannya dilapangan kerja nantinya.

#### **1.5.2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperdalam pengetahuan pariwisata dalam pengembangan konsep ilmiah, khususnya di bidang pengembangan destinasi wisata, serta sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang lain dalam melakukan penelitian yang serupa dalam skala yang lebih luas dan mendalam.